



ANALISA KONSEP PEMBANGUNAN WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN KABUPATEN CILACAP

Indri Arrafi Juliannisa
arrafi.juliannisa@gmail.com

Adi Artino
adiartino29@gmail.com

Arif Maulana
arifmaulana@pm.me3

Hengki Sikumbang
sikumbanghengki@apps.ipb.ac.id

Abstrak

Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Cilacap memiliki karakteristik Desa yang hampir sama. Desa saat ini menjadi penggerak perekonomian setiap wilayah. Pemanfaatan potensi desa dengan optimal dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan keleluasaan untuk setiap Desa mengelola dan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif. Ada beberapa teknik analisa yang digunakan diantaranya analisa Podes, analisis DPSIR (Driver, Pressure, State, Impact, Response), Analisa Indeks Williamson, Analisa Location Quotient, dan Analisa Shift Share. Kabupaten Lampung Selatan memiliki 260 Desa dengan 39 desa berbatasan dengan laut sehingga potensi hasil kelautan sangat melimpah dengan basis perikanan tangkap. Kabupaten Cilacap memiliki 32 desa yang berbatasan laut dengan basis potensi perikanan tangkap dari total 284 Desa. Pengembangan pembangunan desa wisata untuk Kabupaten Lampung Selatan sangat cocok dari segi demografi, sedangkan Kabupaten Cilacap berfokus kepada pengembangan Desa tangguh bencana dan Desa Industri. Kabupaten Lampung Selatan memiliki ketimpangan wilayah yang relatif rendah dibandingkan dengan Kabupaten Cilacap. Pengembangan sektor basis yang paling dominan di Lampung Selatan adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Kabupaten Cilacap didominasi oleh sektor pengadaan listrik dan gas.

Kata Kunci: Podes, Ketimpangan Wilayah, Sektor Basis

Abstract



Mengutip Ini Sebagai: Juliannisa, 2022. *Analisa Konsep Pembangunan Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Dan Kabupaten Cilacap, Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 56-76. doi.org/10.35590/jeb.v9i1.4505

South Lampung Regency and Cilacap Regency have almost the same village characteristics. The village is currently a driving force for the economy of each region. Optimal utilization of village potential can reduce poverty and inequality between areas. Law No. 6 of 2014 concerning Villages allows each village to manage and optimize all available resources for the community's welfare. This research was conducted using a mixed method, namely qualitative and quantitative. Several analytical techniques are used, including Podes analysis, DPSIR analysis (Driver, Pressure, State, Impact, Response), Williamson Index analysis, Location Quotient analysis, and Shift Share analysis. South Lampung Regency has 260 villages with 39 villages bordering the sea, so the potential for marine products is abundant based on capture fisheries. Cilacap Regency has 32 villages bordering the ocean based on the potential for capturing fisheries from a total of 284 villages. The development of tourism village development for the South Lampung Regency is very suitable in terms of demography, while Cilacap Regency focuses on developing disaster-resilient towns and industrial villages. South Lampung Regency has a relatively low regional inequality compared to Cilacap Regency. The most dominant base sector development in South Lampung is the Agriculture, Forestry, and Fisheries sector, and the electricity and gas procurement sector dominate Cilacap Regency.

Keywords: Village Potential, Regional Disparity, Base Sector

PENDAHULUAN

Desa adalah lokomotif perekonomian nasional, sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa telah beralih dari objek pembangunan menjadi subyek pembangunan. Eksistensi peraturan tersebut memberikan sejumlah kewenangan bagi Desa bertindak lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus segala urusan pemerintah termasuk mengakomodir kepentingan masyarakat. Perubahan ini kemudian merubah fokus pemerintah dalam model pembangunan Desa. Akibatnya terjadi peningkatan jumlah masyarakat desa yang semakin banyak tertarik bekerja di Kota. Faktor pendorongnya adalah jumlah upah minimum yang diterima di desa lebih kecil dibandingkan di kota sehingga terlihat bahwa pemerintah belum memberikan perhatiannya dalam upaya pembangunan Desa. Desa sendiri memiliki peranan sebagai *hinterland* atau daerah pendukung khususnya dalam memproduksi hasil pertanian antara lain perternakan, perikanan, perkebunan hingga tanaman pangan, di mana produksi tersebut dibutuhkan oleh warga baik desa maupun kota, selain itu juga desa memiliki fungsi sebagai pemasok tenaga kerja.

Desa menjadi salah satu lokasi yang diminati para pelaku migrasi, dalam hal ini kita membahas lingkup desa dengan skala kabupaten, dimana setiap kabupaten tersebut memiliki daya tarik untuk masyarakat berpindah untuk menetap dalam jangka waktu yang lama, hal ini mengakibatkan jumlah penduduk pada wilayah tersebut menjadi bertambah. Fenomena ini digambarkan sebagai fenomena migrasi, dimana hal ini sesuai dengan model migrasi oleh Todaro (2008) bahwa keberlangsungan arus migrasi merupakan bentuk tanggapan terhadap adanya pendapatan yang berbeda antara daerah asal dengan daerah tujuan. Adapun jumlah penduduk akan bertambah karena adanya migrasi, hal tersebut ditandai dengan jumlah penduduk yang memasuki suatu wilayah jumlahnya akan lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang meninggalkan wilayah tersebut (Kodir, 2015). Migrasi dapat memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian suatu wilayah, namun juga dapat beberakibat negatif, hal ini dikarenakan migrasi yang tidak direncanakan, jumlah pelaku migrasi dan kualitas softskill serta hardskill para pelaku

migran yang tidak terkondisikan dengan baik, hanya akan menjadi beban suatu wilayah.

Hingga saat ini penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan di mana persebaran penduduk antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda. Adapun Provinsi Jawa Tengah menempati posisi ketiga sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Migrasi menjadi salah satu faktor komponen yang mempengaruhi tingginya jumlah penduduk, salah satu kabupaten yang memiliki tingkat migrasi tinggi di Jawa Tengah adalah Kabupaten Cilacap.

Tabel 1. Arus Migrasi Seumur Hidup Antar Kabupaten / Kota Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten/ Kota Tempat Tinggal Sekarang	Pekalongan	Pemalang	Kabupaten/Kota Tempat Lahir									Jumlah
			Tegal	Brebes	Kota Magelang	Surakarta	Salatiga	Kota Semarang	Kota Pekalongan	Kota Tegal	Lainnya	
Kab. Cilacap	2544	1475	1600	5229	1225	1023	533	1278	1137	-	54868	1693937
Kab. Banyumas	835	1559	4222	5796	469	1610	670	1429	-	796	57083	1643626
Kab. Purbalingga	282	1873	1493	1306	752	491	14	1064	49	241	20661	897551
Kab. Banjarnegara	323	722	580	76	-	166	-	472	-	-	14468	901330
Kab. Kebumen	501	2029	487	677	67	117	567	670	-	235	44825	1184552
Kab. Purworejo	789	649	636	686	1015	198	239	1871	-	338	44107	710275
Kab. Wonosobo	288	505	1010	39	1034	259	-	2417	-	-	13734	776847
Kab. Magelang	1504	348	1165	217	11269	834	9589	3102	-	34	38056	1244558
Kab. Boyolali	223	1623	1076	584	-	13834	710	1399	314	463	22423	963182
Kab. Klaten	-	740	466	767	36	8726	1890	3653	-	-	66281	1158400
Kab. Sukoharjo	1014	2191	1046	1695	1482	46005	808	2441	244	155	46470	863528
Kab. Wonogiri	252	92	672	615	501	2608	191	687	-	-	23671	948650
Kab. Karanganyar	742	214	406	491	376	25212	659	514	-	-	26876	855621
Kab. Sragen	46	639	592	80	336	6024	1153	2132	-	118	36702	878766
Kab. Grobogan	469	2128	245	930	-	1427	751	367	-	-	22245	1350859
Kab. Bora	382	807	470	-	123	1240	47	595	-	-	32859	851841
Kab. Rembang	250	109	362	-	22	892	367	638	-	-	15434	618780
Kab. Pati	-	516	-	477	165	996	394	646	-	-	14882	123214
Kab. Kudus	247	309	407	833	628	1295	325	3727	-	-	17609	830396
Kab. Jepara	308	654	522	1064	-	471	154	1255	32	-	20599	1186738
Kab. Demak	665	165	547	-	771	1413	1023	25245	-	-	5808	1116964
Kab. Semarang	560	1057	2401	513	1736	864	10929	16135	-	31	36684	999817
Kab. Temanggung	-	776	46	254	1964	1301	292	1076	125	124	14898	745224
Kab. Kendal	642	505	519	340	807	428	449	8467	175	-	14671	941584
Kab. Batang	7695	2583	1200	638	144	1317	-	1453	4169	136	9583	742571
Kab. Pekalongan	834645	8115	1201	661	8	502	-	387	2105	-	12231	873423
Kab. Pemalang	6729	1246682	4198	1222	-	585	-	298	623	1529	15134	1288303
Kab. Tegal	870	5677	1341971	12411	186	1290	653	1282	2013	7656	31322	1424474
Kabupaten Brebes	738	3454	10150	1709197	226	223	245	34	695	1951	36789	1780626
Kota Magelang	46	247	73	11	85660	771	503	1257	208	164	10878	120769
Kota Surakarta	59	383	689	137	2779	357009	1412	5207	382	530	40618	512056
Kota Salatiga	362	594	664	283	652	2215	120056	4081	236	137	15456	183631
Kota Semarang	3265	4690	2672	3852	6566	12902	11269	1226000	2631	2470	117558	1698777
Kota Pekalongan	2830	3377	74	575	-	1149	191	1572	264761	951	9056	296168
Kota Tegal	1212	2268	8342	5500	-	529	224	1572	389	208376	11045	245995
Jumlah	872036	1299755	1392204	1757156	121099	495926	157676	1327742	280287	226455	100E+06	3.40E+07

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

Berdasarkan tabel di atas wilayah Brebes, Pekalongan dan Pemalang merupakan tiga daerah yang menyumbang pelaku migrasi terbesar di wilayah Kabupaten Cilacap, terdapat sektor pendorong di Kabupaten Cilacap seperti sektor primer, sekunder dan tersier. Kabupaten Cilacap menjadi daerah pada posisi kedua dengan migrasi sirkulasi dan permanen, hal ini karena jaraknya yang dekat dengan Jakarta sebagai ibu kota negara oleh karena itu berdampak pada banyak tenaga kerja secara sirkulasi bermigrasi ke Jakarta. Tidak hanya Kabupaten Cilacap yang memiliki angka migrasi yang tinggi, Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu daerah dengan angka migrasi tinggi.

Tabel 2. Arus Migrasi Seumur Hidup Antara Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Lampung

Kabupaten/kota Tempat Tinggal Sekarang	Kabupaten/Kota Tempat Lahir								Jumlah
	Pesawaran	Pringsewu	Mesuji	Tulang Bawang Barat	Pesisir Barat	Bandar Lampung	Metro	Lainnya	
Lampung Barat	240	1305	74	-	1627	1975	1780	66644	292927
Tanggamus	2832	12470	-	-	428	3609	1501	63981	573268
Lampung Selatan	4665	6341	125	-	-	36048	7398	180585	971807
Lampung Timur	1430	1288	1222	696	-	4404	14626	183328	1007893
Lampung Tengah	5341	14991	1219	1216	-	6072	10361	226248	1238097
Lampung Utara	1196	1955	125	1877	14	5305	3581	92174	605822
Way Kanan	1805	2329	908	376	-	896	4530	84131	432526
Tulang Bawang	8964	6226	2864	2005	-	3158	7702	81789	429048
Pesawaran	346354	4807	386	-	143	10994	935	47898	425964
Pringsewu	6376	322683	176	-	-	2866	824	37597	386550
Mesuji	526	3993	92271	1319	-	730	2629	40542	195592
Tulang Bawang Barat	658	1537	1477	144712	-	1335	4635	67461	264474
Pesisir Barat	746	366	130	-	116983	591	580	16101	149732
Bandar Lampung	12554	6856	-	850	1083	730018	5207	148735	977686
Metro	649	1021	300	82	36	3802	105987	35173	158215
Jumlah	394318	388168	101377	153133	120314	811803	172276	1362387	8109601

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa Lampung Selatan berada urutan ke 3 tertinggi sebagai wilayah yang mengalami arus migrasi yang tinggi, adapun daerah yang menjadi pelaku migrasi ke wilayah Lampung Selatan yakni: Kota Bandarlampung, Pringsewu dan Pesawara. Lampung merupakan salah satu daerah yang dipilih sebagai daerah kolonisasi oleh pemerintah Belanda dan hal ini berlangsung hingga masa awal kemerdekaan bahkan sampai pada masa orde baru yang mana wilayah lampung dijadikan sebagai daerah penempatan transmigran (Abdullah). Kabupaten Lampung Selatan dinilai sebagai daerah yang pengurangan kemiskinkinan dan peningkatan IPM nya berada di atas rata-rata, serta fasilitas kesehatan di Kabupaten Lampung selatan merupakan yang terbanyak (Bappenas Lampung, 2015). Selain itu, di bagian wilayah daerah kabupaten Lampung Selatan terdapat sebuah pelabuhan penyebrangan yang menjadi transit dan pintu gerbang Pulau Sumatera antara wilayah Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera.

Melihat tingginya arus migrasi yang telah dijelaskan oleh kedua tabel di atas sehingga diketahui migrasi ini memberikan dampak terhadap pertumbuhan perekonomian yang ada di kedua Kabupaten tersebut, salah satunya dampak yang jelas terlihat adalah tingginya angka pengangguran di kedua wilayah tersebut.

Tabel 3. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Cilacap

Uraian	2018		2019		2020	
	Lampung Selatan	Cilacap	Lampung Selatan	Cilacap	Lampung Selatan	Cilacap
Tingkat Pengangguran	4.49	7.49	4.70	7.24	4.9	9.1

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

Berdasarkan data pada tabel 3, dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Lampung Selatan lebih rendah daripada Kabupaten Cilacap. Hal ini dikarenakan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan semangat menggalakkan program untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja yakni dengan diadakannya *Job Fair* dengan harapan mampu menyerap pekerja dalam jumlah yang lebih banyak, dimana program tersebut melibatkan banyak perusahaan di Kabupaten Lampung Selatan serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Pemerintah Kab. Lampung Selatan, 2022). Terlihat bahwa di tahun 2020 dan 2021 pengangguran di Kabupaten Cilacap meningkat akibat mewabahnya pandemi Covid-19 dan terjadi PHK besar-besaran di tahun tersebut (Jateng Daily, 2022). Melihat angka angkatan kerja yang ada di Kabupaten Cilacap dan Lampung Selatan setiap tahunnya meningkat, namun tingkat pengangguran juga setiap tahunnya selama 2 tahun terakhir pada kedua kabupaten ini selalu meningkat. Salah satu faktor yang dapat memicu perpindahan penduduk ialah akibat faktor ekonomi yang dilihat memiliki peluang yang besar dibandingkan daerah asalnya. Secara teori, pengangguran meningkat akibat penawaran tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan jumlah terserapnya tenaga kerja. Hal ini berlaku pada fenomena migrasi yang terjadi di suatu wilayah (Hasanah, Harlen, & Kadir, 2015).

Tabel 4. Angkatan Kerja (Jiwa)

Keterangan	Jumlah Angkatan Kerja		
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Kabupaten Lampung Selatan	474,579	467,293	517,520
Kabupaten Cilacap	799,403	841,689	830,043

Sumber: BPS, 2018-2020.

Berdasarkan data pada tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja Kabupaten Lampung Selatan lebih sedikit dibandingkan dengan Kabupaten Cilacap, hal tersebut tentunya juga dapat ditentukan dari perbedaan jumlah penduduk di kedua daerah tersebut. Penduduk usia kerja yang termasuk kedalam kelompok angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) kelas teratas di Jawa Barat salah satu daerah nya adalah Kabupaten Cilacap, di mana daerah tersebut memiliki jumlah penduduk bekerja paling tinggi (Astuti & Fajar, 2021).

Lampung Selatan memiliki tenaga kerja yang potensial namun mobilitasnya rendah dan tidak mampu untuk mengisi kekurangan di suatu daerah yang memerlukan di waktu-waktu tertentu terutama pada tenaga kerja pertanian (Suryana, Yusdja, & Gunawan, 2016). Kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Lampung Selatan dalam setahun terakhir persentase tenaga kerja yang aktif secara ekonomi naik sekitar 4,06 poin, sementara itu, pencari kerja di Kabupaten Cilacap tahun 2020 didominasi laki-laki, sebagian besar dari pencari kerja tahun 2020 berpendidikan SLTA dan menurut data lapangan usaha

didominasi oleh sektor pertanian. Penyebab terjadinya pengangguran salah satunya adalah keadaan kemiskinan, sebab dalam keadaan miskin seseorang menjadi kurang produktif dan terhambat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memperoleh pendidikan yang layak.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Cilacap, 2019-2021

Uraian	2018		2019		2020	
	Lampung Selatan	Cilacap	Lampung Selatan	Cilacap	Lampung Selatan	Cilacap
Jumlah Penduduk Miskin	289.236	185.180	422.328	198.600	439.421	201.710

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018-2020.

Kemiskinan tercatat sebagai masalah dalam pembangunan di kedua wilayah ini. Penduduk miskin di Kabupaten Lampung Selatan pada 2021 naik dibandingkan 2020. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini juga tak lepas karena naiknya garis kemiskinan. Kabupaten Lampung Selatan berada pada urutan ketiga dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 145,85 ribu jiwa. Begitu juga dengan Kabupaten Cilacap yang garis kemiskinannya di Tahun 2020 sebesar 351.735 rupiah per bulan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 363.367 rupiah per kapita per bulan. Di tahun 2020, jumlah penduduk miskin Kabupaten Cilacap hanya sebanyak 198.600 orang atau 11,46 persen, namun mengalami kenaikan menjadi menjadi 201.710 orang atau sebesar 11,67 persen di tahun 2021 sehingga menimbulkan kenaikan penduduk miskin sebesar 1,56 persen atau 3.110 orang. Keadaan kemiskinan ini menjadi penghambat perkembangan suatu wilayah karena dalam pengembangan ekonomi suatu wilayah Sumber Daya Manusia berperan penting, baik dalam pertumbuhan wilayah yang ada desa dan kota memiliki peranan yang sama penting.

Tabel 6. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Cilacap, 2018-2020

Uraian	2018		2019		2020	
	Lampung Selatan	Cilacap	Lampung Selatan	Cilacap	Lampung Selatan	Cilacap
Angka harapan hidup	69,2	73,52	69,33	73,73	69,42	73,90
Harapan lama sekolah	12,33	12,49	12,5	12,50	12,52	12,63
Rata-rata lama sekolah	7,68	6,93	7,69	6,97	7,7	7,09
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	9.978	10.639	9.875	10.44	9.931	10.534

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018-2020.

Selain rendahnya pertumbuhan IPM, Kabupaten Lampung Selatan juga dihadapkan masalah berupa peningkatan penduduk miskin pada Maret 2021 yang terhitung mencapai 145,85 ribu jiwa atau naik sebanyak 2,52 ribu jiwa dibanding Maret 2020. Kondisi serupa juga dihadapi oleh Kabupaten Cilacap dimana jumlah penduduk miskin di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 11,67 persen atau naik menjadi 201.710 jiwa. Salah satu instrument yang dapat mendorong peningkatan IPM adalah dalam bidang pendidikan, dengan adanya Pendidikan yang ideal atau yang digambarkan dengan angka harapan sekolah yang meningkat, maka akan memberikan perbaikan untuk pengurangan pengurangan

serta perbaikan kondisi ekonomi di suatu daerah.

Tabel 7. Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Cilacap, 2018-2020

Uraian	2018		2019		2020	
	Lampung Selatan	Cilacap	Lampung Selatan	Cilacap	Lampung Selatan	Cilacap
SD	97,87	99,39	98,33	85,52	98,46	60,23
SMP	75,84	98,71	77,36	84,39	78,77	59,82
SMA	54,58	99,22	54,5	84,32	54,74	60,25

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018-2020.

Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya pada setiap jenjang pendidikan dimana APM hanya mengalami sedikit peningkatan dari 97,87 pada tahun 2018 menjadi 98,46 di tahun 2020. Kemudian berdasarkan hasil Susenas tahun 2020 menunjukkan bahwa Kabupaten Cilacap memiliki Angka Partisipasi Sekolah (APS) dalam kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,86 persen. Sedangkan APS pada kelompok umur 13-15 tahun tercatat sebesar 96,37 persen. Sementara APS pada kelompok usia 16-18 tahun tercatat 70,14 persen. Pada tahun 2020 tercatat penduduk Kabupaten Cilacap memiliki angka Rata-rata lama sekolah sebesar 6,93 tahun sehingga menunjukkan rata-rata pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas hanya mencapai tingkat 1 SLTP atau baru mencapai jenjang tamat Sekolah Dasar.

Jumlah nilai yang mampu dihasilkan dari seluruh unit usaha di suatu wilayah tertentu atau jumlah keseluruhan nilai atas barang dan jasa akhir yang mampu dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu wilayah, hal ini merupakan penjabaran dari PDRB (BPS, 2022), dengan adanya peningkatan PDRB ini dapat membantu perbaikan keadaan pengangguran disuatu wilayah, sebab adanya hubungan timbal balik antara PDRB kepada jumlah pengangguran, dimana seorang penduduk yang memasuki suatu daerah tentunya akan berkontribusi terhadap PDRB daerah tersebut karena penduduk yang masuk dan bekerja di wilayah tempat ia bermigrasi sehingga hal ini berpengaruh terhadap terserap para tenaga kerja khususnya di wilayah migrasi dan output yang dihasilkan akan maksimal dari seluruh sektor perekonomian sehingga akan berdampak positif bagi PDRB wilayah tujuan migrasi (Susanti, Komariyah, & Muslihatiningtyas, 2015).

Tabel 8. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK

Uraian	2018		2019		2020	
	Lampung Selatan	Cilacap	Lampung Selatan	Cilacap	Lampung Selatan	Cilacap
Jumlah Angkatan Kerja	98,100,57	28,791.44	100,327.30	30,267.88	90,011.58	29,743.30

Sumber: BPS, 2018 - 2020.

Berdasarkan data pada tabel 8 pertumbuhan ekonomi dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan lebih besar daripada Kabupaten Cilacap. Kabupaten Lampung Selatan menjadi salah

satu daerah dengan laju pertumbuhan PDRB yang cukup tinggi terhadap Provinsi Lampung, di mana dipengaruhi oleh beberapa lapangan usaha atau industri yang ada (Marlina, Endrayanto, & Hijriani, 2021). Kabupaten Cilacap menjadi kabupaten dengan jumlah PDRB terbesar di dibandingkan dengan daerah lainnya yang masuk dalam Kawasan Barlingmascekab (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen) (Sutrisno, 2012). Pertumbuhan ekonomi relatif didukung oleh suasana daerah yang kondusif dengan iklim investasi yang nyaman dan pelayanan yang mudah (Dinas Komunikasi Dan Informatika Cilacap, 2019).

Produktifitas dari para pekerja di suatu daerah dapat ditingkatkan melalui kenaikan upah minimum dari pekerja tersebut. Kenaikan upah yang terlalu drastis justru akan menimbulkan pukulan yang keras bagi perusahaan Indonesia apabila tidak diikuti dengan peningkatan produktifitas kerja. Dalam hal ini, khususnya bagi UKM dan perusahaan padat karya, kebijakan mengani kenaikan upah dinilai hanya menjadi bahan untuk mengejar popularitas pemerintah yang dapat memicu gelombang PHK dan berdampak pada meningkatnya pengangguran serta bertambahnya jumlah penduduk miskin. Hal ini juga harus sesuai dengan *tag line* yang digaungkan oleh pemerintah yakni 4Pro (*Pro-growth, pro-job, pro-poor* dan *Pro-environment*). Jelas bahwa dari kalimat tersebut kebijakan kenaikan upah minimum hanya mempertimbangkan kepentingan buruh dan mengabaikan kepentingan usaha atau dalam kata lain tidak pro-bisnis, alih alih hanya agar tidak terjadi kekisruhan akibat demonstran buruh mengenai permintaan kenaikan upah (Kementerian Perindustrian RI, 2012).

Tabel 9. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) (Rupiah)

Uraian	2018		2019		2020	
	Lampung Selatan	Cilacap	Lampung Selatan	Cilacap	Lampung Selatan	Cilacap
Jumlah Upah Minimum	2,168,702.42	1,841,209	2,365,935	1,989,058	2.567.168	2,158,327

Sumber: BPS, 2018-2020.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Cilacap terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, UMK Kabupaten Lampung selatan lebih tinggi dibandingkan UMK Kabupaten Cilacap. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab, salah satunya ialah karena adanya inflasi tahunan. Selain itu selama 3 tahun terakhir, UMK terus mengalami kenaikan akibat adanya aturan mengenai pengupahan yakni PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja (barus, 2021).

Masyarakat akan bermigrasi akan terjadi karena tingkat pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dan persebarannya yang tidak merata antara satu daerah dengan daerah lainnya, di mana cenderung akan terpusat diperkotaan. Pesatnya pertumbuhan ekonomi di daerah perkotaan, sedangkan perkembangan ekonomi di wilayah pedesaan terbilang cukup lamban, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang mengalami ketimpangan antara daerah di perkotaan dengan pedesaan (Purnomo, 2009). Migrasi yang terjadi pada wilayah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Lampung Selatan, dapat memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap aspek sosial sampai dengan ekonomi,

dalam penelitian ini akan membahas lebih detail terkait dampak tersebut menggunakan metode DPSIR (*Driver, Pressure, State, Impact and Response*) guna mengetahui faktor penyebab dan akibat dari permasalahan migrasi tersebut. Tidak hanya menggunakan teknik analisa DPSIR, dalam jurnal ini akan melihat juga bagaimana pengaruh variable IPM, Kemiskinan, Upah, Angkatan Kerja dan PDRB terhadap Pengangguran sebagai akibat dari lonjakan migrasi yang berjumlah besar di kedua Kabupaten tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Pertumbuhan Penduduk

Teori Malthus mengemukakan bahwa menurunnya aktivitas ekonomi lebih dari sekedar lancher atau tidaknya aktivitas ekonomi itu sendiri hal ini merupakan proses dari pembangunan ekonomi. Malthus dalam teori ini tidak menyebutkan adanya pergerakan perekonomian dalam menuju kondisi stationer akan tetapi terdapat beberapa kali kemerosotan sebelum mencapai tingkatan paling tinggi dari suatu pembangunan. Malthus menyebutkan juga bahwa pertumbuhan penduduk merupakan dampak dari adanya proses pembangunan, akan tetapi bertambahnya jumlah penduduk tidak dapat terjadi tanpa adanya kesejahteraan yang juga meningkat. Apabila tingkat akumulasi modal mengalami peningkatan maka dapat mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja. Kondisi tersebut dapat mendorong pertumbuhan penduduk, namun dari pertumbuhan penduduk itu sendiri akan meningkatkan kesejahteraan hanya ketika pertumbuhannya dapat mendorong permintaan efektif (Harati, 2022).

2. Teori Pengangguran

Teori Keynes memiliki pernyataan yang berlawanan daengan Teori Klasik. Adapun Keynes menyebutkan bahwa rendahnya permintaan agregat dapat menyebabkan pengangguran, oleh sbeba itu rendahnya produksi bukan menjadu penyebab terhambatnta pertumbuhan ekonomi melainkan disebabkan karena konsumsi yang rendah. Menurut Keynes, kondisi tersebut dapat dilimpahkan dalam mmekanisme pasar bebas. Adanya kerugian akan terjadi ketika tenaga kerja yang meningkat dan upah akan menurun sehingga menyebkan menurunnya daya beli masyarakat akan barang dan jasa, sehingga kerugian akan dialami oleh para produsen dan penyerapan tenaga kerja juga akan menurun (Hartati, 2021).

3. Migrasi

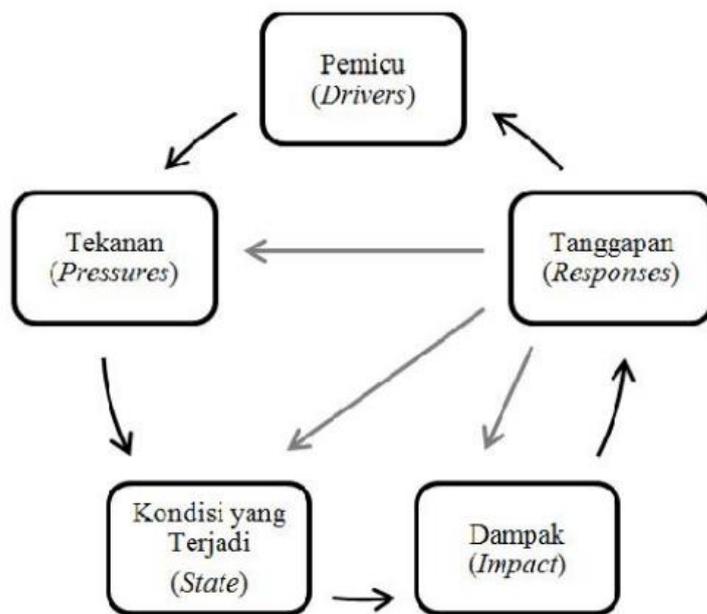
Teori migrasi oleh Todaro dalam Mantra (2000) memiliki penjelasan yang bertolak dari asumsi migrasi yang terjadi dari desa ke kota pada dasarnya adalah fenomena ekonomi. Seseorang memiliki keputusan dalam melakukan migrasi ke kota sudah direncanakan secara rasional. Pada teori Todari memiliki dasar pemikiran yaitu adanya tanggapan terhadap perbedaan pendapatan di desa dengan kota menjadi penentu berlangsungnya arus migrasi. Adapun pendapatan yang dimaksud bukan pendapat actual akan tetapi pendapatan yang diharapkan (*expected income*). Para migran akan memilih salah satu diantara peluang yang memiliki keuntungan yang maksimal dari harapannya di mana dikuru berdasarkan besar kecilnya selisih angka pendapatan riil pekerjaan yang ada di kota dengan di desa, hal ini melalui pertimbangan dengan melakukan perbandingan

pasar-pasar tenaga kerja yang tersedia antara sektor pedesaan dan perkotaan, selisih dari angka pendapatan riil tersebut juga menjadi perhitungan atas besar kecilnya peluang para migran dalam mendapatkan pekerjaan di kota.

METODOLOGI PENELITIAN

Teknik Analisa DPSIR

Penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan sample lokasi Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Lampung Selatan, selama tahun 2015-2020. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS). Menurut (Smeets dan Waterings, 1999) model dan teknik ini memiliki tujuan guna mengetahui hubungan sebab-akibat antara sistem lingkungan dengan sistem manusia dan juga untuk membantu para pembuat kebijakan memahami informasi terkait. Adapun pengembangan model analisis *Driving Force - State - Response (DSR)* dan *Pressure - State - Response (PSR)* yaitu model *Driver - Pressure - State - Impact - Response (DPSIR)*. Model tersebut dapat memberikan pemahan terkait suatu sistem secara menyeluruh, selain itu juga dapat memfasilitasi proses dalam mengintervensi serta menyusun kebijakan. Analisis DPSIR terdiri atas lima bagian antara lain: (1) *Driving Forces* (faktor pemicu) yaitu merupakan analisis yang akan menjelaskan terkait isu-isu atau kondisi yang sedang terjadi di masyarakat (sosial, demografi, ekonomi, gaya hidup, pola produksi, dan konsumsi masyarakat); (2) *pressure* (tekanan) yang akan menjelaskan jawaban atas pertanyaan alasan terjadinya suatu masalah tersebut; (3) *state* (kondisi eksisting) akan memaparkan penjelasan terkait kondisi yang sedang terjadi di lingkungan pada saat ini, (4) *impact* (dampak) merupakan analisis yang akan menjelaskan dampak yang muncul dari adanya isu serta penanggulangan isu itu sendiri; (5) *response* (tanggapan) merupakan penjelasan yang akan memamparkan hal apa yang harus dilakukan guna mengatasi berbagai masalah yang terjadi di mana melibatkan pemangku kepentingan.



Gambar 1. DPSIR

Teknik Analisa Indeks Williamson

Williamson Index merupakan alat ukur ketimpangan pembangunan daerah yang pertama kali yang digunakan oleh Jeffry G. Williamson. Adapun data dasar yang digunakan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai data dasar (Firdamayanti & Prabowo, 2021). Selain itu, *Williamson Index* juga dapat menentukan seberapa besarnya kesenjangan pendapatan dengan melakukan penelitian hubungan antara disparitas wilayah dengan klause pembangunan ekonomi, adapun data yang digunakan yaitu data ekonomi yang maju dan ekonomi yang berkembang (Meliza & Murtala, 2020). Indeks Williamson berkisar antara $0 < IW < 1$, Berikut formualsi Indeks Williamson:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - Y)^2 / n}}{Y} \dots \dots \dots (1)$$

- Y_i = PDRB per kapita setiap Kabupaten/Kota
- V_w = Indeks Ketimpangan Williamson
- F_i = Jumlah penduduk setiap Kabupaten/Kota
- Y = PDRB per kapita rata-rata seluruh Kabupaten/Kota

Teknik Analisa Location Quotient

Analisis *location quotient* (LQ) ini guna mengetahui seberapa jauh tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi dalam suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis atau *leading* sektor. Menurut Hood (1998) dalam (Hendayana, 2003) mengemukakan yaitu LQ merupakan suatu alat pengembangan ekonomi yang lebih sederhana, di mana yang awalnya dikembangkan oleh Robert Murray Haig (1887-1953) sebagai bagian dari karya nya dibidang teori basis ekonomi (EBT). Berikut metode *location quotient* berdasarkan Bendavid-Val (1991) dan Rusli Ghalib (2005):

$$LQ = \frac{E_i^R / E^R}{E_i^N / E^N} \dots \dots \dots (2)$$

Dimana:

- LQ = nilai LQ suatu sektor i di suatu daerah
- E_i^N = nilai output sektor i daerah referensi
- E_i^R = nilai output sektor i di suatu daerah
- E^N = nilai total daerah referensi
- E^R = output total sektor di suatu daerah

Kriteria pengukuran Location Quotient (LQ) adalah (Nikijuluw, 2013):

1. Nilai LQ di sektor $i > 1$, menunjukkan laju pertumbuhan sektor i di suatu daerah lebih besar dari laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi, sehingga sektor i merupakan sektor unggulan di suatu daerah sekaligus merupakan basis ekonomi yang perlu dikembangkan.
2. Nilai LQ di sektor $i < 1$, menunjukkan laju pertumbuhan sektor i di suatu daerah lebih kecil dari laju pertumbuhan sektor yang sama didaerah referensi, oleh karena itu sektor i bukan merupakan sektor unggulan di suatu daerah dan bukan merupakan basis ekonomi serta tidak prospektif untuk dikembangkan.

Teknik Analisa *Shift-Share*

Analisis *shift-share* dikembangkan oleh Dunn (1960), metode ini menjelaskan perubahan dimensi ekonomi, dengan konsentrasi utama pada variabel kesempatan kerja. Tujuan utamanya yaitu untuk membandingkan wilayah yang berbeda menuai perubahan ekonominya. Singkatnya, penerapan teknik ini terletak pada kemampuannya untuk menentukan perubahan di dua wilayah yang berasal dari evolusi ekonomi nasional (Flores, Solis, & Alvarez-Aros, 2020). Berikut persamaan dari analisis *shift share* menurut Tri Widodo (2006):

$$Dij = Nij + Mij + Cij \quad Nij = Eij \times Rn \quad Mij = Eij (Rin - Rn) \quad Cij = Eij (Rij - Rin)$$

Keterangan:

Dij = Dampak nyata pertumbuhan ekonomi daerah dari pengaruh pertumbuhan nasional	Eij = PDRB (output) sektor i (kab/kota)
Nij = Pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap perekonomian di suatu daerah	Rij = Tingkat pertumbuhan sektor i (Kab/Kota)
Mij = Pergeseran proposional atau pengaruh bauran industri	Rin = Tingkat pertumbuhan sektor i
Cij = Pengaruh keunggulan kompetitif suatu sektor tertentu (kab/kota) dibanding tingkat nasional	Rn = Tingkat pertumbuhan PDRB

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISA PODES

Kabupaten Lampung Selatan

Jumlah Desa yang ada di Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 260 Desa dengan 39 Desa berbatasan laut sehingga menyebabkan potensi hasil kelautan sangat melimpah dengan perikanan tangkap menjadi sektor kedua terbaik setelah pertanian, selain itu juga ada tambak garam, dan wisata bahari. Lampung Selatan memiliki potensi hutan yang sangat baik, akan tetapi masyarakat tidak terlalu bergantung banyak dengan potensi hutan yang dimiliki. Jenis komoditi mayoritas masih bergerak di pengolah hasil padi, palawija, kakao dan kopi. Akses jalan setiap desa masih jalan tanah dan masih kecil yang sudah di aspal dan beton, selain itu sebagian besar masyarakatnya sudah menikmati listrik dan memanfaatkan gas sebagai bahan bakar memasak, akan tetapi masih banyak juga yang menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar memasak. Bencana alam yang dominan di Lampung Selatan yaitu Banjir dan diikuti oleh gelombang pasang laut serta kekeringan lahan. Upaya mitigasi bencana alam yang dilakukan oleh pemerintah Lampung Selatan dengan membuat rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana serta focus untuk melakukan perawatan dan normalisasi daerah serapan air. Sektor Pendidikan didominasi oleh jumlah sekolah dasar yang banyak, adanya sarana Kesehatan yang baik dengan tersebar nya tempat prakti bidan dan poskesdes. Lampung Selatan memiliki 12 situs cagar budaya yang dikelola, Lembaga atau kelompok

masyarakat di dominasi oleh kelompok tani. Aksesibilitas untuk sarana komunikasi sudah sangat bagus dengan jumlah Menara pemancar sinyal yang tersebar sebanyak 286 pada masing-masing desa di Lampung Selatan. Sektor kegiatan ekonomi Lampung Selatan didominasi oleh hasil industri gerabah dan juga hasil pengolahan kayu, ada juga yang menghasilkan kain tenun asli Lampung Selatan.

Kabupaten Cilacap

Secara administrasi, Kabupaten Cilacap memiliki demografi yang hampir sama dengan Kabupaten Lampung Selatan karena ada sekitar 32 Desa berbatasan dengan laut lepas sehingga potensi pengembangan perikanan tagkap sangat banyak. Jumlah desa yang ada di Cilacap sebanyak 284 Desa, dimana ada sekitar 217 desa berada di luar fungsi kawasan hutan dan sisanya desa yang ada dalam kawasan hutan. Pemanfaatan hutan di Cilacap banyak digunakan untuk produksi dengan tingkat ketergantungan pada sektor hutan masuk kategori sedang. Mata pencaharian penduduk mayoritas bergerak di sektor pertanian dengan padi sebagai komoditas utama. Akses jalan sudah semua di aspal atau beton sehingga kemudahan dalam jalur transportasi dan logistik. Dari sektor perumahan dan lingkungan hidup masyarakat Cilacap masih banyak belum menggunakan listrik sebagai penerangan, bahan bakar untuk memasak dominan menggunakan gas LPG dan juga masih banyak yang menggunakan kayu bakar. Kecenderungan masyarakat Cilacap dalam penanganan sampah yaitu dengan cara dibakar.

Kabupaten Cilacap rentan dengan aktivitas bencana alam seperti Tanah Longsor, Banjir, Gema Bumi, Tsunami, Gelombang Paang, Angin Putting beliung, Gunung Meletus, Kebakaran Hutan dan Kekeringan. Pemerintah Kabupaten Cilacap memiliki upaya dalam mengatasi bencana alam dengan melakukan system peringatan dini bencana alam di setiap desa dan juga menggunakan rambu-rambu serta jalur evakuasi bencana alam. Pada sektor Pendidikan masih didominasi untuk sekolah dasar dan setingkat, adanya perguruan tinggi sebanyak 13 kampus swasta menjadikan Cilacap sangat konsen terhadap pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya. Akses kesehatan untuk masyarakat sudah merata tersedia di setiap desa dengan tempat praktik bidan dan dokter serta dilengkapi dengan poskesdes. Kabupaten Cilacap memiliki cagar budaya yang dikelola sebanyak 29 unit, sedangkan untuk Lembaga masyarakat masih tetap didominasi dengan kelompok tani, PKK, dan karang taruna. Aktivitas lalu lintas di Cilacap banyak melalui jalan Darat karena ada trayek angkutan umum yang dibuat oleh pemda cilcap sebagai penghubung antar desa. Media komunikasi didukung dengan sinyal internet atau telepon yang kuat dengan adanya 267 menara BTS. Industri di Cilacap banyak didominasi oleh industri makanan dan minuman serta industry gerabah da industry anyaman bambu.

ANALISA STRATEGI PEMBANGUNAN WILAYAH

Kabupaten Lampung Selatan

Dalam mendukung potensi wisata di suatu wilayah maka wilayah tersebut pasti memiliki kekayaan alam seperti keindahan pantai dan beragamnya budaya yang dimiliki, kondisi ini dimiliki oleh Kabupaten Lampung Selatan. Adapun hal tersebut merupakan bentuk pondasi guna memperkuat daya saing dan jejaring aksesibilitas serta infrastruktur

yang mampu menggerakkan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan. Pengembangan kegiatan pariwisata yang berbasis pada potensi wisata alam sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 bahwa terdapat kebijakan penataan ruang. Dalam menjamin kelancaran akses yang dapat mendukung bagaimana terbentuknya pergerakan jalur-jalur wisata menjadi strategi dalam melakukan pengembangannya (Amanda, Sulistyorini, & Ibad, 2017). Tema pembangunan Kabupaten Lampung Selatan yaitu meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur sebagai upaya mengembangkan potensi wilayah dan peningkatan kualitas SDM (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2021).

Kabupaten Cilacap

Kawasan industri terbesar di wilayah Jawa Tengah salah satu dari kota yaitu Kabupaten Cilacap, hal ini juga diperkuat dengan rencana pemerintah Indonesia khususnya presiden Jokowi yang akan menjadikan Kabupaten Cilacap menjadi kawasan ekonomi khusus industri yang berskala nasional (Putri, 2019). Kabupaten Cilacap sendiri memiliki 2 sektor basis yakni Industri Pengolahan serta Pertambangan dan Penggalian. Diketahui terdapat kilang minyak terbesar yang yaitu PT Pertamina yang memiliki kapasitas produksi sebesar 33,4 persen dari jumlah kapasitas nasional dan pertambangan batu bara dengan hasil kandungan sebesar 3,724-3,890 kalori. Pertambangan lainnya seperti tambang emas dengan hasil tambang sebesar 4-7 gram/ton dan tambang pasir besi, dimana kedua sektor tersebut terus mengalami peningkatan dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut (Putri, 2019). Dilihat berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Cilacap, terdapat beberapa strategi pembangunan yang direncanakan yakni dalam bidang transportasi dan perhubungan Pemerintah Kabupaten Cilacap akan merealisasikan pembangunan jalan tol antara Cilacap – Tasik, Cilacap – Tegal, dan Cilacap – Yogyakarta serta pengembangan pelabuhan menjadi prasarana berstandar internasional. Berikut adalah Perda Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana tata ruang wilayah kabupaten cilacap tahun 2011 – 2031:

Tabel 10. Rencana Pola Ruang Pembangunan Wilayah Cilacap

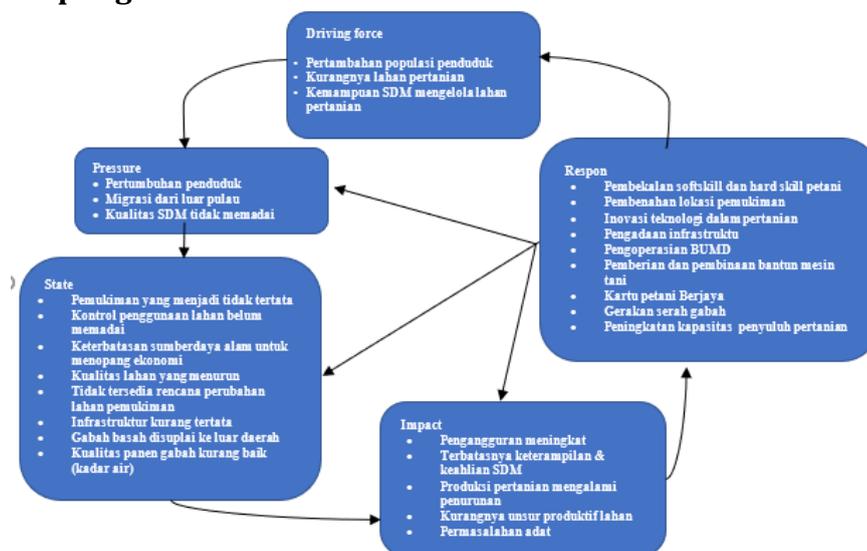
No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)
1	Kawasan Lindung		2	Kawasan Budidaya	
a)	Kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat	11.779	a)	Hutan produksi	28.483
b)	Kawasan resapan air	18.999	b)	Hutan produksi terbatas	21.112
c)	Sempadan sungai	13.614	c)	Kawasan hutan rakyat	31.917
d)	Sempadan pantai	7.010	d)	Pertanian tanaman pangan lahan basah	63.092
e)	Kawasan perlindungan sekitar waduk	533	e)	Pertanian tanaman pangan lahan kering	28.037
f)	Kawasan perlindungan jaringan irigasi	19.466	f)	Pertanian hortikultura	17.900
g)	Kawasan perlindungan sekitar mata air	201	g)	Kawasan perkebunan	73.144
h)	RTH	9.889	h)	Kawasan peternakan	803
i)	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya	6.956,5	i)	Kawasan peruntukan perikanan	66.917
j)	Kawasan Rawan Bencana Alam	5.953	j)	Kawasan peruntukan pertambangan	122.276
k)	Kawasan Lindung Geologi	1.274	k)	Kawasan peruntukan industri	1.295
			l)	Kawasan permukiman perkotaan	11.287
			m)	Kawasan permukiman perdesaan	21.972

Sumber : BPS, 2020

Sesuai dengan strategi pembangunan yang diusung oleh Pemerintah kabupaten Cilacap, memang tertera bahwa terdapat beberapa strategi untuk kawasan lindung dan budidaya yang mana termuat dalam strategi penentuan rencana pengelolaan kawasan (Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, 2011).

HASIL ANALISA DPSIR

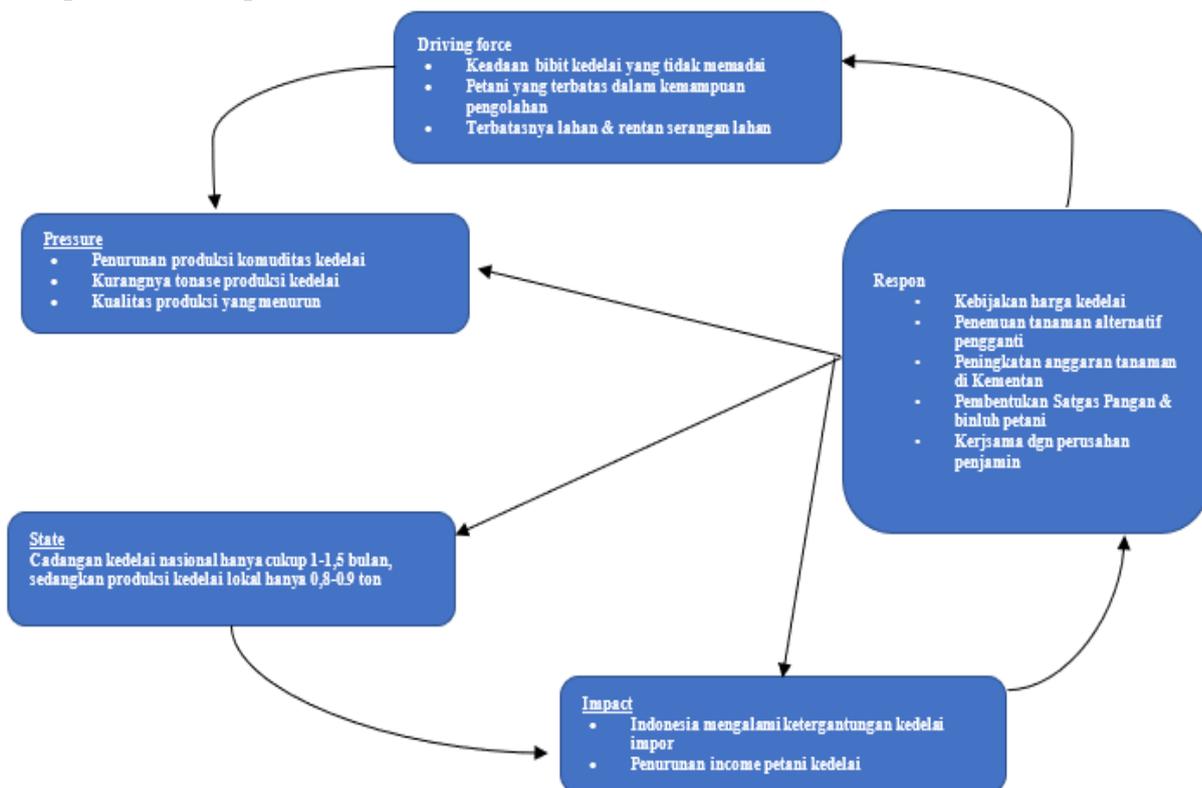
Kabupaten Lampung Selatan



Pada Kabupaten Lampung Selatan analisa DPSIR yang dilakukan terkait ketenagakerjaan dan sektor pertanian, dimulai dari *Driving Force*: terdapat penambahan penduduk dikarenakan adanya fenomena migrasi, lahan pertanian yang tersedia tidak dapat mencukupi jumlah buruh tani dan petani yang tersedia, dan kemampuan SDM yang mengolah lahan pertanian tidak mempunyai, sehingga dalam mengolah lahan pertanian dan mencari pekerjaan para SDM ini merasa kesulitan, akibatnya hal itu menjadi *Pressure* kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, yakni : pertumbuhan penduduk yang mengingkat pesat, meningkatnya angka migrasi dari luar, dan kualitas SDM yang hidup di Kabupaten Lampung Selatan kurang memadai, maka kondisi (*State*) yang terjadi pada Kabupaten Lampung Selatan saat ini adalah terdapat wilayah pemukiman di sekitar pantai yang tidak tertata dengan baik, kontrol dalam penggunaan dan pengolahan lahan terkait banyaknya jumlah penduduk juga bisa dikatakan tidak ada, sumberdaya alam yang tersedia untuk menopang hidup menjadi terbatas, belum ada kajian atau rencana untuk memindahkan beberapa lokasi pemukiman di wilayah Lampung Selatan tersebut. Infrastruktur yang tersedia, sepertihalnya jalanan umum menjadi terlalu padat, dan tidak mampu teralokaikan kepada seluruh masyarakat, karena kualitas petani dan lahan pertaniannya kecil, maka gabah basah disuplai ke luar daerah, kualitas panen gabah yang kurang baik, hal ini disebabkan oleh lahan kekurangan unsur hara.

Dampak (*impact*) yang dirasakan oleh Kabupaten Lampung Selatan yakni: angka pengangguran meningkat, keterbatasan produktifitas oleh SDM yang ada, produksi pertanian mengalami penurunan, lahan menjadi tidak efektif dan efisien, permasalahan adat terkait lahan, serta adanya permasalahan harga, oleh sebab itu *Response* yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keadaan tersebut adalah pembekalan softskill dan hardskill dengan cara memberikan pelatihan terkait peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan pemahaman serta pengetahuan SDM tersebut, terkait lokasi pemukiman warga baiknya dilakukan pembenahan / realokasi pemukiman warga serta dilakukan pengadaan infrastruktur sebab jumlah masyarakat yang bermukim sudah semakin banyak, sehingga infrastruktur juga harus ditingkatkan, selain itu patut dilakukan inovasi terhadap alat produksi pertanian guna meningkatkan kualitas produksi pertanian. Terkait masalah petani baiknya diberikan respon yang lebih fokus kepada kesejahteraan petani seperti digerakannya BUMD, pemberian dan pembinaan penggunaan alat bantu mesin, kartu petani berjaya, gerakan serah gabah, dan pemantauan kualitas SDM terkait pertanian dalam hal peningkatan kapasitas dalam kegiatan penyuluhan petani.

Kabupaten Cilacap



Pada Kabupaten Cilacap, analisa DPSIR terkait sektor pertanian khususnya petani kedelai, diawali oleh *Driving Force*: dimana keadaan bibit kedelai yang tidak memadai, petani yang terbatas dalam kemampuan pengolahan, serta terbatasnya lahan & rentan akan serangan lahan, maka hal tersebut menjadi *Pressure* dalam hal: penurunan komoditas kedelai, berkurangnya tonase produksi kedelai, dan kualitas produksi kedelai yang menurun, hal ini menyebabkan *State* / keadaan yang terjadi adalah cadangan kedelai nasional hanya cukup 1-1,5 bulan, sedangkan produksi kedelai lokal hanya 0,8-0,9 ton. Maka hal ini berdampak kepada negara Indonesia mengalami ketergantungan impor kedelai dengan negara seperti Amerika, Kanada, Argentina dan Brasil dan income petani pun jadi berkurang disebabkan keadaan produksi dari kedelai ini berkurang, maka *Respon* yang dapat dilakukan adalah menelaah Kembali kebijakan terkait harga kedelai, adanya alternatif /pengganti komposisi kedelai sebagai bahan baku.

ANALISA KETIMPANGAN WILAYAH (INDEKS WILLIAMSON)

Tabel 11. Tabel 11. Indeks Williamson Lampung Selatan dan Kabupaten Cilacap

Kabupaten/Kota	Indeks Williamson		
	2018	2019	2020
Lampung Selatan	0,015	0,016	0,021
Cilacap	0,211	0,219	0,222

Sumber: Data Olahan, 2022.

Perbandingan nilai indeks wiliamson jika dibandingkan antara kedua Kabupaten sangat kontras sekali, dimana Kabupaten Cilacap memiliki ketimpangan yang sangat tinggi dibandingkan dengan Lampung Selatan. Dari tahun 2018 sampai tahun 2020 kedua wilayah ini nilai indeks wiliamsonnya mengalami kenaikan pada kedua wilayah. Kabupaten Cilacap memiliki jumlah penduduk yang sangat padat dibandingkan kabupaten Lampung Selatan sehingga nilai indeks williamsonnya relative tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Lampung Selatan.

**ANALISA LOCATION QUOTIENT (LQ)
Kabupaten Lampung Selatan**

Tabel 12.Location Quotient Lampung Selatan

<p style="text-align: center;">Kuadran I</p> <p style="text-align: center;">Sektor dengan Pertumbuhan Cepat dan Berdaya Saing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transportasi dan Pergudangan • Informasi dan Komunikasi <p>PP (+), PPW(+)</p>	<p style="text-align: center;">Kuadran III</p> <p style="text-align: center;">Sektor dengan Pertumbuhan Cepat dan Tidak Berdaya Saing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Industri Pengolahan • Electricity dan Gas • Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Lainnya • Konstruksi • Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib • Jasa Pendidikan • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial • Jasa Lainnya <p>PP (+), PPW(-)</p>
<p style="text-align: center;">Kuadran II</p> <p style="text-align: center;">Sektor dengan Pertumbuhan Lambat dan Berdaya Saing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan • Pertambangan dan Penggalian • Jasa Keuangan dan Asuransi <p>PP (-), PPW(+)</p>	<p style="text-align: center;">Kuadran IV</p> <p style="text-align: center;">Sektor dengan Pertumbuhan Lambat dan Tidak Berdaya Saing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perdagangan Besar dan Resparasi Kendaraan • Real Estate • Jasa Perusahaan <p>PP (-), PPW(-)</p>

Kabupaten Lampung Selatan memiliki sektor basis yang ada di kuadran 1. Bentang alam dan demografi lampung selatan lebih banyak sektor yang yang mendukung dari sektor pertanian dengan komoditas penghasil padi, sektor perikanan dengan komoditas perikanan tangkap karena Lampung selatan berbataan dengan laut lepas sehingga hampir banyak masyarakat desa berprofesi sebagai nelayan, selain itu ada juga di sektor kehutanan yang berokus pada pengolahan hutan produksi dan pengahsil komoditi kopi serta kakao. Sektor ini banyak di ekspor keluar daerah karena sangat tersedia melimpah di Kabupaten Lampung Selatan.

Kabupaten Cilacap

Tabel 13. Location Quotient Cilacap

Lapangan Usaha	Nilai LQ (Location Quotient)						Rata-rata
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Pertambangan dan Penggalian	2.7	3.1	3	2.5	2.5	2.7	2.7
Industri Pengolahan	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Pengadaan Listrik dan Gas	21.1	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	4.7
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Konstruksi	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Transportasi dan Pergudangan	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Informasi dan Komunikasi	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Real Estate	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Jasa Perusahaan	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Jasa Pendidikan	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Jasa Lainnya	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Sumber : BPS 2020

Terdapat lima sektor yang menjadi sektor basis Kabupaten Cilacap antara lain pertanian, kehutanan dan perikanan (1,2), sektor pertambangan dan penggalian (2,7), sektor pengadaan listrik dan gas (4,7), sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (1,1), dan sektor transportasi dan pergudangan (1,7). Apabila nilai LQ > 1, artinya dua sektor tersebut menjadi basis dan sumber pertumbuhan, selain itu juga terdapat keunggulan komparatif dan hasilnya tidak hanya memenuhi kebutuhan di daerah tersebut tetapi juga dapat di ekspor ke luar wilayah.

Berdasarkan hasil LQ yang sudah dilakukan di dapatkan beberapa sektor basis yang dapat menjadi pusat pertumbuhan Kabupaten Cilacap diantaranya sektor pengadaan listrik dan gas dengan nilai 4,7. Posisi kedua dari sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai 2,7, posisi ketiga yaitu sektor transportasi dan pergudangan dengan nilai 1,7. Basis yang lain untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berada diposisi keempat dengan nilai 1,2 dan sektor basis yang terakhir berada pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang. Potensi sektor basis yang banyak ini harus dikembangkan dan dimanfaatkan dalam rangka mengurangi ketimpangan pendapatan yang ada di kabupaten Cilacap.

**ANALISA SHIFT SHARE
Kabupaten Lampung Selatan**

Tabel 14. Analisa Shift Share Lampung Selatan

<p style="text-align: center;">Kuadran I Sektor Basis Prospektif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan • Kontruksi 	<p style="text-align: center;">Kuadran III Sektor Basis Tidak Prospektif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Industri Pengolahan
<p style="text-align: center;">Kuadran II Sektor Nonbasis Prospektif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertambangan dan Penggalian • Transportasi dan Pergudangan • Informasi dan Komunikasi • Jasa Keuangan dan Asuransi • Jasa Perusahaan 	<p style="text-align: center;">Kuadran IV Sektor dengan Pertumbuhan Lambat dan Tidak Berdaya Saing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Electricity dan Gas • Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Lainnya • Perdagangan Besar dan Resparasi Kendaraan • Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum • Real Estate • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib • Jasa Pendidikan • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial • Jasa Lainnya

Ada empat kuadran yang ada berdasarkan hasil Analisa Shift Share diantaranya Kuadran I masuk sektor basis dengan prospektif tinggi diantaranya ada beberapa sektor yang dominan yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan serta konstruksi, kuadran II masuk kategori sektor non basis prospektif, diantaranya pertmbangan, penggalian, transportasi, pergudangan, informasi komunikasi, jasa keuangan dan jasa perusahaan. Sektor ini bisa diproyeksikan menjadi sektor basis karena masih memiliki prospektif dalam jangka Panjang. Kuadran II masuk kategori sektor basis tapi tidak prospektif yaitu industry pengolahan, dimana sektor ini perlu menjadi perhatian serius untuk dikembangkan sebagai peningkatan pendapatan masyarakat local. Kuadaran IV masuk kategori sektor non basis tidak prospektif, sektor ini harus dihindari untuk dikembangkan karena tidak bisa meyumbang pergerakan laju pertumbuhan ekonomi Lampung selatan diantaranya sektor listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, perdagangan besar dan reparasi kendaraan, penyedian akomodasi dan amakan minum, real estate, administrasi pemerintah, jasa Pendidikan dan jasa Kesehatan lainnya.

Kabupaten Cilacap

Tabel 15.Shift Share Cilacap

No	Sektor	PRij	PPij	PPWij
		Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	289280.90	(2725.93)	(43809.82)
2	Pertambangan dan Penggalian	451.40	35.00	(640.11)
3	Industri Pengolahan	4061748.89	(1176684.3)	(318699.49)
4	Pengadaan Listrik dan Gas	31546.81	(3697.52)	(7188.80)
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	43618.49	2539.33	20081.95
6	F. Kontruksi	4888846,05	717828.52	1431907.04
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6687709.18	181717.60	1519221.69
8	Transportasi dan Pergudangan	1599412.65	397023.99	(65610.93)
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	640755.92	268061.13	(11407.33)
10	Informasi dan Komunikasi	1644039.46	1011562.2	(294546.96)
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1803032.78	(662269.11)	(110570.15)
12	Real Estate	1958467.89	413040.89	378815.82
13	Jasa Perusahaan	604869.69	187124.52	981.50
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	464318.31	(75451.48)	(21643.09)
15	Jasa Pendidikan	752374.13	22918.39	197560.82
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	363852.33	147369.41	158922.21
17	Jasa Lainnya	269414.86	88298.00	28290.37

Sumber : BPS 2020

Kabupaten Cilcap memiliki 12 sektor yang dapat menumbuhkan perekonomian karena memiliki nilai keunggulan kompetitif positif atau memiliki nilai persaingan antara lain sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, kontruksi, perdagangan besar dan eceran; resparasi mobil dan sepeda motor, dan lain-lain. Secara umum kabupaten Cilacap berdasarkan hasil analisa Shif Share Analisis yang masuk kategori basis dan memiliki prospektif tinggi untuk dikembangkan diantaranya sektir pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi kendaraan.

SIMPULAN

Ada beberapa kesimpulan berdasarkan hasil analisa yang dilakukan diantaranya:

1. Potensi desa yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Selatan adalah sektor pariwisata, serta untuk sertr peranian Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Cilacap memiliki kesamaan dari sisi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
2. Strategi pengembangan dan pembangunan kabupaten Lampung Selatan berfokus pada sektor pariwisata dengan membuat program dewa wisata, sedangkan untuk Kabupaten Cilacap berfokus dalam hal mitigasi bencana, berdasarkan data yang ada, bencana alam sangat rutin terjadi di Kabupaten Cilacap sehingga pembuatan program Desa Tangguh Bencana adalah sesuatu yang harus dilakukan.

3. Kabupaten Lampung Selatan memiliki Gini ratio yang rendah dibandingkan dengan Kabupaten Cilacap.
4. Pengembangan sektor basis untuk Kabupaten Lampung Selatan masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sedangkan untuk Kabupaten Cilacap sektor basis yang tinggi berada pada sektor pengadaan listrik dan gas.
5. Penurunan tingkat partisipasi pengangguran ditopang oleh adanya kawasan industri KAIL serta sektor Pariwisata yang sudah mulai berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (n.d.). Faktor-faktor penentu status migrasi penduduk Propinsi Lampung. *Tesis*.
- Astuti, A. Y., & Fajar, M. K. (2021). ANALISIS KETENAGAKERJAAN DAN PDRB JAWA TENGAH TAHUN 2017 DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS. *Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 2021*, 16-22; Vol.7, No.1.
- Badan Pusat Statistik. (2021, Agustus). *Badan Pusat Statistik*. Retrieved from Tingkat Penangguran Terbuka Menurut Provinsi: <https://www.bps.go.id/indicator/6/543/1/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>
- Bappenas Lampung. (2015). *Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Lampung*. Lampung: Simreg.Bappenas.go.id.
- barus, D. D. (2021, November 25). UMK Lampung Selatan Diusulkan Naik Rp.2,6 Juta. Lampung Selatan, Lampung, Indonesia.
- BPS. (2022). *Badan Pusat Statistik*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: [https://www.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html#:~:text=PDRB%20adalah%20jumlah%20nilai%20tambah,tertentu%20\(biasanya%20satu%20tahun\)](https://www.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html#:~:text=PDRB%20adalah%20jumlah%20nilai%20tambah,tertentu%20(biasanya%20satu%20tahun)).
- Dinas Komunikasi Dan Informatika Cilacap. (2019). *Analisis Ekonomi Dan Pendapatan Regional Kabupaten Cilacap Tahun 2019*. Cilacap: Dinas Komunikasi Dan Informatika Cilacap.
- Division of the New York State Departement of Labor. (2017, June). Locarion Quotients: A Statewide and Regional Analysis. *Division of Research and Statistic*, pp. 1-10.
- Firdamayanti, & Prabowo, P. S. (2021). Analisis Ketimpangan Pendapatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Antar Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2019. *Journal of Economics*, 109-123; Volume 1 Nomor 2.
- Flores, A. J., Solis, S. Y., & Alvarez-Aros, E. L. (2020). Contextualization of economic activity and innovationperspective in Reynosa, Mexico: A shift-share analysis2004-2014. *Espacios*, 21; Vol.41 Issue 03.
- Harati, R. (2022). Analisis Permintaan Gula Pasir Di Kota Palangkaraya. *Jepp*, 58-63; Vol. 2 No.1.
- Hartati, Y. S. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 79-92; Vol.12 No.1.
- Hasanah, N., Harlen, & Kadir, H. (2015). Pengaruh Migrasi Masuk Dan Investasi Terhadap Pengangguran Di Kota Pekanbaru. *JOM Fekon*.
- Jateng Daily. (2022, Januari 24). Fenomena Pengangguran di Jateng. Jawa Tengah, Indonesia.
- Jumiyanti, K. R. (2018). Analisis Location Quotient dalam Penentuan Sektor Basis dan Non Basis di

- Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Development Review*, 29-43; Vol.1 No.1.
- Kementerian Perindustrian RI. (2012, November 28). *Berita Industri*. Retrieved from kemenperin.go.id: <https://kemenperin.go.id/artikel/5093/KENAIKAN-UPAH-TERLALU-DRASTIS-Pemerintah-Tidak-Probisnis>
- Kodir, A. (2015). Keterkaitan Migrasi Penduduk dan Perekonomian Di Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 93-108, Volume 13, nomor 1.
- Marlina, L., Endrayanto, T., & Hijriani, A. (2021). Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Akibat Pembangunan Jalan Tol Berbasis Citra Satelit Di Kabupaten Lampung Selatan. *Journal of Food System and Agribusiness*, 11-18; Vol. 5 (1).
- Meliza, & Murtala. (2020). Analisis Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 27-38; Volume 3 Nomor 1.
- Nikijuluw, J. B. (2013). Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. *Cita Ekonomika*, 196-303; Vol. VII No.2.
- Pemerintah Kab. Lampung Selatan. (2022, Januari 28). lampungselatankab.go.id. Retrieved from Portal Informasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan: <https://www.lampungselatankab.go.id/web/2022/01/28/kurangi-jumlah-pengangguran-pemkab-lampung-selatan-akan-gelar-job-fair-2022/>
- Purnomo, D. (2009). Fenomena Migrasi Tenaga Kerja dan Perannya Bagi Pembangunan Daerah Asal : Studi Empiris Di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP)*, Vol. 10 No.1.
- Raintung, A. V., Walewangko, E. N., & Siwu, H. F. (2021). Identifikasi Potensi Ekonomi Sektor Identifikasi Potensi Ekonomi Sektor. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 124-133; Vol.21 No.06.
- Suryana, R. N., Yusdja, Y., & Gunawan, M. (2016). Ketersediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja Di Lampung. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 8-18; Vol.1 No.1.
- Susanti, D. D., Komariyah, S., & Muslihatiningtyas, F. (2015). Pengaruh Migrasi Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Kabupaten Jember. *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*.
- Sutrisno, A. (2012). Analisis Ketimpangan Pendapatan dan Pengembangan Sektor Unggulan Di Kabupaten Dalam Kawasan BARLINGMASCEKAB Tahun 2007-2010. *Economics Development Analysis Journal*, 42-49; 1.